

Bab III

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

A. Gambaran Umum Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi nasional di pertengahan tahun 2008 mengalami tantangan yang cukup berat, antara lain diakibatkan oleh stabilitas moneter yang mengalami tekanan eksternal berupa ekspektasi yang berlebihan terhadap perubahan kebijakan moneter di luar negeri, meski demikian pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari besarnya kenaikan PDRB harga konstan yang terbentuk pada tahun 2007 dibandingkan dengan PDRB tahun lalu, memperlihatkan terjadinya kenaikan setiap tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palopo periode tahun 2002-2007 rata-rata mencapai 7,2 % pertahun. Pada tahun 2002 nilai PDRB konstan Kota Palopo mencapai Rp. 515.295,93 juta selanjutnya pada tahun 2007 mencapai Rp.743.974,17 juta, sedangkan jika dilihat berdasarkan atas harga pasar PDRB Kota Palopo tahun 2007 telah mencapai Rp. 1.157.385,81 juta dengan pertumbuhan rata-rata 13,83% setiap tahun selama periode tahun 2002-2007. Namun demikian kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan baru mencapai 1,72 %.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dipicu oleh peningkatan produksi di berbagai sektor. Sektor atau lapangan usaha yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah lapangan usaha Bank dan Lembaga Keuangan dengan rata-rata pertumbuhan riil mencapai 14,75%, kemudian lapangan usaha jasa-jasa dengan rata-rata pertumbuhan riil mencapai 10,81%, disusul lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan riil mencapai 9,70% sedangkan lapangan usaha pertanian memperlihatkan kecenderungan lebih melambat dengan pertumbuhan riil rata-rata mencapai 5,43% setiap tahun. Pertumbuhan riil sektor pertanian pada tahun 2004 mencapai 5,94% namun pada tahun 2006 menjadi 3,85%.

Namun demikian jika dilihat dari struktur ekonomi Kota Palopo tahun 2004-2006, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi utama dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi mencapai 33,52%, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran 18,03%, disusul sektor jasa-jasa dengan kontribusi 12,97%, sektor keuangan dan persewaan mencapai 11,19%. Jika dilihat dari nilai produksi atau harga masing-masing sektor berdasarkan harga pasar, maka terdapat tiga sektor yang memberikan produksi terbesar yaitu sektor pertanian mencapai Rp. 371.752,78 juta, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai Rp. 174.954,94 juta, dan sektor jasa-jasa mencapai 127.354,12. Pada sektor pertanian sesungguhnya peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya kontribusi sub.sektor pertanian yang didominasi oleh peningkatan produksi sub.sektor perikanan terutama beberapa komoditas unggulan Kota Palopo yang memiliki prospek ekspor seperti rumput laut (*glacilaria* dan *cattonic*).

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikasi bergeraknya roda perekonomian di daerah, dan peluang untuk mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian yang dibutuhkan terutama sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendukung perubahan struktur ekonomi daerah kepada struktur ekonomi yang lebih moderen dimana prosentase kontribusi sektor lebih merata. Dampak dari pertumbuhan tersebut secara tidak langsung telah mendorong peningkatan pendapatan perkapita penduduk, dimana pada tahun 2005 pendapatan perkapita mencapai Rp. 7, juta / kapita, pada tahun 2006 mencapai Rp. 7, 4 juta / kapita.

Pertumbuhan investasi daerah di Kota Palopo semakin kondusif, yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan investasi daerah rata-rata 5,52% setiap tahun, nilai investasi berdasarkan harga konstan pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp. 107,66 Milyar meningkat menjadi Rp. 131,12 Milyar pada tahun 2005, dan pada tahun 2007 nilai investasi telah mencapai 146,88 Milyar. Prosentase investasi terhadap PDRB selama tahun 2002-2007 rata-rata mencapai 20% setiap tahun. Pada tahun 2002 nilai investasi mencapai Rp. 106,268,31 juta atau sekitar 20,62% dari nilai PDRB konstan sebesar Rp. 515.295,93 juta. Pada tahun 2007 nilai investasi telah mencapai Rp. 146.88 juta atau sekitar 19,6% dari nilai PDRB konstan yakni sebesar Rp. 743.974,17 juta.

Struktur investasi memperlihatkan besarnya penyerapan investasi setiap sektor sehingga nampak sektor-sektor mana saja yang mampu menyerap investasi yang besar dan yang investasinya relatif kecil. Berdasarkan data struktur investasi tahun 2001-2005 menunjukkan bahwa secara akumulasi (rata-rata tahun 2001-2005) investasi yang terbesar ditanam adalah pada sektor angkutan dan komunikasi dengan investasi rata-rata pertahun Rp.30,44 milyar atau sekitar 26,18% dari total investasi, selanjutnya sektor perdagangan hotel dan restoran dengan nilai investasi rata-rata pertahun mencapai Rp. 27,86 Milyar atau 23,93 % dari total investasi, kemudian sektor pertanian dengan nilai investasi rata-rata mencapai Rp.27,3 Milyar atau 23,38 % dari total investasi. Sektor-sektor lainnya yaitu lembaga keuangan dan persewaan, jasa-jasa dan industri pengolahan rata-rata kontribusi investasinya di bawah 5 % dari total investasi, sedangkan sektor-sektor yang kontribusi investasinya di bawah 1 % adalah sektor Listrik, gas dan air minum, sektor pertambangan dan penggalian. Jika dilihat dari tingkat efisiensi berinvestasi pada masing-masing sektor, terlihat bahwa jika menggunakan data koefisien ICOR akumulasi time lag 0, kondisi yang terbentuk selama periode tahun 2001-2005 diperoleh rata-rata koefisien ICOR pada sektor pertanian sebesar 2,15, sektor pertambangan 3,10 sektor industri pengolahan 4,42, sektor listrik, gas dan air minum 1,54, sektor bangunan 2,66, sektor perdagangan 3,15, sektor angkutan dan komunikasi 9,07, sektor lembaga keuangan 2,01 dan sektor jasa-jasa 0,89.

B. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2009-2013.

Jika dilihat dari data perkembangan anggaran pendapatan daerah dari tahun 2003-2008, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2003 yang merupakan tahun awal terbentuknya Kota Palopo, anggaran pendapatan daerah hanya Rp. 77,1 Milyar lebih dan pada akhir periode pertama pembangunan daerah tahun 2008 pendapatan daerah telah mencapai Rp.372,3 Milyar lebih, dengan demikian pendapatan daerah telah mengalami peningkatan 367 % dari kondisi tahun 2003 -2008 atau rata-rata setiap tahun sekitar 34,9 %. Tetapi peningkatan tahun 2003-2005 lebih banyak disebabkan oleh bertambahnya dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih disebabkan oleh pertambahan pegawai dan pelaksanaan beberapa program nasional yang berlangsung dalam tahun 2003-2005. Sedangkan pertumbuhan rata-rata yang normal hanya berlangsung hanya pada tahun 2006-2008, dengan kisaran rata-rata 12%. Berdasarkan asumsi tersebut maka proyeksi pendapatan dan penerimaan daerah tahun 2013 diproyeksikan mencapai Rp. 621,5 M lebih, proyeksi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 4
Rata-rata pendapatan daerah tahun 2006-2008 dan proyeksi tahun 2009-2013

No	Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp.M)	%
1	2003	77,1	
2	2004	127,1	64,4
3	2005	174,4	37,2
4	2006	256,6	47,1
5	2007	300,9	17,2
6	2008	372,3	8,7
Rata-rata 2003-2008			34,9
Rata-rata 2006-2008			12,9
4	2009*	416,9	12
5	2010*	466,9	12
6	2011*	513,6	12
7	2012*	564,9	12
8	2013*	621,5	12

Jika dilihat dari struktur pendapatan daerah, maka pendapatan daerah masih didominasi oleh kelompok dana perimbangan yakni rata-rata 80% dari total pendapatan daerah, sedangkan kelompok pendapatan asli daerah rata-rata 15% dari total pendapatan daerah, selebihnya sekitar 5% dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambaran mengenai kapasitas keuangan daerah, diperoleh dengan membandingkan proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja wajib, Belanja wajib adalah keseluruhan belanja tidak langsung (belanja pegawai, tunjangan, subsidi, dan bantuan keuangan) dan belanja dalam rangka pembayaran utang daerah dan pinjaman daerah yang telah jatuh tempo.

Jika mencermati data mengenai perkembangan belanja daerah khususnya belanja yang bersifat wajib rata-rata mencapai 20% setiap tahun. Jumlah belanja wajib pada tahun anggaran 2006 mencapai Rp, 98,2 M lebih, pada tahun 2007 menjadi Rp.122,4 M lebih dan pada tahun 2008 dan sudah mencapai Rp.143,5 M lebih, atau rata-rata 20,9 % setiap tahun. Jika asumsi rata-rata tersebut tidak banyak mengalami perubahan, maka diproyeksikan pada tahun 2013, belanja wajib akan mencapai Rp. 370,7 M lebih. Proyeksi tersebut masih akan bertambah jika memperhitungkan laju inflasi nasional dan faktor-faktor berpengaruh lainnya. Dengan demikian kapasitas keuangan daerah dalam membiayai program-program pembangunan daerah, khususnya pada komponen belanja langsung, rata-rata hanya mencapai 61,5%, artinya jika proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2009 diproyeksikan Rp.416,9 M lebih, maka kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan hanya berkisar 61,5% atau sekitar Rp. 256,4 Miliar lebih. Kondisi ini memerlukan kebijakan pembiayaan setiap tahun, yang akan ditetapkan kemudian dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Legislatif.

C. Kerangka Fiscal Daerah.

Kerangka fiscal daerah merupakan kebijakan strategis untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan riil setiap sektor sesuai dengan keadaan yang diinginkan dan diharapkan dapat tercapai dalam periode waktu tertentu. Upaya untuk mengarahkan pertumbuhan sektor-sektor dilakukan melalui kerangka kebijakan berupa pemberian insentif atau fasilitas di beberapa sektor, pembangunan sarana dan prasarana, kemudahan-kemudahan berinvestasi di daerah. Peningkatan investasi daerah ke depan diharapkan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palopo, dan

meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Sasaran-sasaran strategis dalam pembangunan ekonomi ke depan antara lain :

- 1) Mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palopo
- 2) Mempercepat pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor-sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan perindustrian yang berbasis pertanian
- 3) Mengarahkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana bagi berkembangnya investasi daerah khususnya pada sektor-sektor perdagangan, jasa-jasa, dan industri-industri kecil dan menengah yang berbasis hasil pertanian
- 4) Prioritas utama pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan serta berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan

Pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi Kota Palopo menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Kedua tantangan tersebut adalah (1) meningkatkan kualitas hasil pertanian dan daya saing industri daerah melalui penggunaan teknologi tepat guna dan pembangunan keunggulan kompetitif Kota Palopo, yang pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan dan pertumbuhan ekonomi, (2) Pelaksanaan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas, didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat di daerah.

Pengalaman menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Palopo yang memperlihatkan keterpurukan sama seperti daerah lainnya di Indonesia, akan tetapi pada tahun 2004 kembali tumbuh menjadi 7 % melalui penggalakan pembangunan di segala sektor dan bidang. Hal ini disebabkan karena Kota Palopo pada saat itu mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan sebagai leading sektor ekonomi sehingga memberi dampak pengaruh yang cukup signifikan terhadap struktur ekonomi Kota Palopo. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa ekspor komoditi khususnya pada sub sektor perkebunan memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan

pertumbuhan PDRB Kota Palopo yang jumlahnya cukup besar, (pada tahun 2000 produksi perkebunan rakyat mengalami peningkatan dan memiliki prospek pemasaran, hal ini disebabkan karena kelangkaan komoditas tersebut di pasar regional dan pasar internasional dan negara penghasil utama serta wilayah-wilayah penghasil utama di Indonesia mengalami kegagalan panen. Kelemahan mendasar lain, yaitu komoditas unggulan daerah sangat peka terhadap fluktuasi harga pasar (dunia), yang antara lain disebabkan karena tidak ada satupun komoditas dimaksud merupakan *price taker*.

Berdasarkan uraian diatas, maka strategi pembangunan ekonomi Kota Palopo untuk 5 tahun ke depan adalah pembangunan di bidang pertanian melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah, bidang industri khususnya industri kecil berbasis pertanian, perdagangan dan jasa terutama berbasis hasil pertanian dan potensi lokal di samping sektor-sektor unggulan lainnya. Sebagai penjabaran arah kebijakan pembangunan Kota Palopo di bidang ekonomi, secara khusus bagian ini akan membahas secara terpadu berbagai program pembangunan Daerah Kota Palopo di bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Untuk memacu pembangunan ekonomi di Kota Palopo, maka perlu diketahui peluang yang dapat diraih dan tantangan yang akan dihadapi. Peluang yang dapat diraih adalah terdapatnya beberapa jenis komoditas unggulan (sektor basis ekonomi khususnya pada sub sektor perikanan dan perkebunan), terbukanya kesempatan bagi daerah untuk menarik investasi dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Palopo dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tantangan yang dihadapi adalah stabilitas beberapa indikator ekonomi makro secara nasional seperti nilai tukar rupiah yang tidak menentu, laju inflasi dan suku bunga yang cukup tinggi, sikap mental spekulatif dan konsumtif dikalangan masyarakat, investasi dan ekspor belum pulih mengingat sektor swasta masih berada dalam tahap rehabilitasi dan konsolidasi.

Dalam era otonomi daerah, kita perlu mereposisi paradigma ekonomi, dimana masyarakat tidak hanya menjadi obyek pungutan, akan tetapi peningkatan penerimaan dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi melalui peningkatan pajak

dan retribusi daerah, dengan memberikan keleluasaan berusaha kepada masyarakat dan menciptakan inovasi-inovasi usaha serta memaksimalkan semua potensi yang ada, sehingga pembangunan ekonomi yang mengarah pada out put semata harus ditinggalkan dan mengembangkan pada pembangunan yang memberikan nilai tambah (*value added*), kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi, maka konsep pemikiran jangka panjang diarahkan pada pengembangan tekno ekonomi, dimana implikasi kebijakan adalah pentingnya strategi pembangunan industri yang berorientasi ke dalam (*insourcing*) melalui teknologi untuk *core competence* (kompetensi inti) guna mengurangi kelemahan pembangunan yang berorientasi keluar (*out sourcing*) melalui impor modal dan teknologi, sehingga hal ini akan mengurangi ketergantungan dan menciptakan lahan baru sebagai ajang untuk mengadakan transfer dan alih teknologi. Kebijakan antara lain:

- a) Mengembangkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan sebagai basis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
- b) Penyediaan fasilitas ekonomi (*economic facilitys*) yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pola kemitraan dengan pihak investor dan pemilik modal.
- c) Meningkatkan daya saing hasil perikanan budidaya tambak dan rumput laut yang berbasis teknologi dan kerjasama antara daerah
- d) Mendirikan gudang dan bursa ekonomi bagi terlaksananya transaksi ekonomi di Kota Palopo.
- e) Menyiapkan Kawasan Industri Palopo (KIPA) guna memfasilitasi berkembangnya industri-industri baru.
- f) Memperkuat interkoneksi aktivitas ekonomi kewilayahan, yang bertujuan secara sinergik memperkuat ketahanan ekonomi antar wilayah. Untuk itu perlu dibangun secara terpadu kerjasama ekonomi dengan daerah-daerah yang ada di sekitar Kota Palopo.
- g) Mengatur tatanan pasar sehingga produk-produk lokal dapat bersaing secara kompetitif melalui penciptaan jasa-jasa pemasaran yang berorientasi ekspor.

- h) Khusus energi listrik akan dibuka peluang investasi kepada PLN dan pihak swasta baik lokal maupun dari luar, untuk membangun pembangkit-pembangkit baru PLTA, PLTU, Micro Hydro dan tenaga surya, khususnya dalam mengantisipasi pembangunan Kawasan Industri Palopo.
- i) Mendorong terbentuknya jasa sertifikasi dan konsultasi manajemen bagi peningkatan daya saing dan kualitas produk.
- j) Membuka wawasan dan perubahan perilaku yang bertujuan untuk menciptakan produk dari bahan dasar menjadi bahan baku setengah jadi atau bernilai tambah.

D. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain diarahkan pada:

- a) Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah
- b) Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional
- c) Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, dengan alternatif melakukan pinjaman kepada pihak-pihak lainnya, dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan resiko fiskal lainnya
- d) Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
- e) Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.

- f) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Dalam upaya mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu Kota Pelayanan Jasa terkemuka di Kawasan Timur Indonesia, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap pembangunan pusat-pusat pelayanan ekonomi wilayah, membangun kelembagaan perbankan yang tangguh, pembangunan pusat pelayanan pendidikan tinggi dan kesehatan regional serta pembenahan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalan sumber pembiayaan antara lain dari pinjaman dan obligasi daerah, serta melakukan efisiensi belanja.

Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah meliputi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi faktor internal dan eksternal wilayah. Kondisi eksternal yang paling banyak mempengaruhi perubahan asumsi-asumsi perekonomian daerah saat ini dan kedepan diantaranya, tidak stabilnya harga Bahan Bakar Minyak, distribusi yang tidak lancar, kebijakan Pemerintah dalam penyesuaian harga BBM dan kebijakan pemberian subsidi BBM kepada keluarga miskin. Saat ini berbagai program pembangunan yang dilakukan pada skala nasional yang terkait dengan prioritas saat ini yakni pengurangan kemiskinan dan pengangguran terbuka, diharapkan dapat memberikan iklim ketenagakerjaan dan kesempatan kerja yang lebih luas. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan imbas di daerah. Demikian halnya dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan proses berlangsungnya roda perekonomian. Menyadari kondisi tersebut maka kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Kebijakan Umum pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik daerah, peningkatan keterampilan Aparat Pengelola Pendapatan Daerah agar mendukung tingkat produktifitas yang tinggi, meningkatkan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada Daerah / Negara dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b) Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan tahun anggaran 2008, dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- d) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada :

- i. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- ii. Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah.

Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, guna peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum, tetap menjadi landasan utama dalam merealisasikan target pendapatan melalui :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penegakan Perda dibidang pendapatan.

Berdasarkan program-program tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan jenis penerimaan dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bidang pendapatan dengan menempuh pendekatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memaksimalkan penerimaan tersebut dibutuhkan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan

kewenangan yang dimiliki unit pengelola pendapatan daerah dengan menetapkan target secara rasional dan terukur dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.

b. Pendapatan Dana Perimbangan.

Pendapatan dari Dana Perimbangan sangat terkait dengan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dan fiskal yang diserahkan kepada daerah, komponen Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan Dana Perimbangan yang telah dicapai atas dasar formulasi bagi hasil yang telah ditetapkan dengan kemampuan optimal pemungutan yang dilakukan di daerah. Untuk tahun 2008 komponen Dana Alokasi Khusus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam struktur APBD adalah merupakan jenis penerimaan yang bersumber dari dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya.

Pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan dalam APBD menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Belanja pembangunan melalui APBD yang merupakan belanja investasi Pemerintah yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan investasi di daerah, tercapainya target pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh investasi Pemerintah namun lebih banyak dipengaruhi oleh belanja sektor swasta dalam semua lapangan usaha produksi. Oleh karena itu investasi Pemerintah diarahkan pada belanja program pembangunan yang dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar dan merangsang pihak swasta untuk lebih meningkatkan investasinya di daerah, terutama para pemilik modal dari luar daerah sehingga dapat menggerakkan ekonomi di daerah secara produktif.

2. Anggaran Belanja

Belanja daerah dapat dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja utama dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai, sehingga belanja tidak langsung merupakan belanja prioritas utama yang dibiayai dari dana yang bersumber dari dana DAU.

Berdasarkan pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga

b. Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja daerah di susun dengan pendekatan kinerja yang ingin di capai (*performance based budgeting*). Dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan khususnya dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan daerah sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada :

- 1) Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik

- 2) Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan pemerintahan
- 3) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- 5) Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja.
- 6) Membangun *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) terutama untuk menyelesaikan program-program yang harus dirampungkan dalam lebih dari satu tahun anggaran.
- 7) Memberikan bantuan-bantuan (khususnya) keuangan dalam membentuk:
 - a) Subsidi, untuk mendorong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik.
 - b) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai *seed money*.
 - c) Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial.
 - d) Bantuan Keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerja sama/komitmen antar pemerintah daerah.
- 8) Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a) Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
 - b) Melakukan analisis *Cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.